

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Investasi

Ada banyak pendapat yang di kemukakan oleh berbagai pihak terhadap pengertian tentang investasi. Secara umum investasi merupakan suatu kegiatan penempatan dana pada aset produktif dengan harapan mendapatkan pertumbuhan modal dalam jangka waktu tertentu. Pada dasarnya investasi secara konvensional dapat diartikan sebagai suatu kegiatan bisnis yang pasif.

Menurut (Martono dan Marjito, 2002) salah satu investasi merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan kedalam suatu aset (aktiva) dengan harapan memperoleh pendapatan di masa yang akan datang. Menurut (Mulyadi, 2001) menyatakan bahwa investasi adalah pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akandatang. Menurut (Simamora, 2000) investasi adalah suatu aktiva yang digunakan oleh perusahaan untuk pertumbuhan kekayaannya melalui distribusi hasil investasi seperti pendapatan bunga, royalty, deviden, pendapatan sewa dan lain-lain, untuk apresiasi nilai investasi, atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi, seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan dagang.

Berdasarkan dari beberapa pengertian para ahli di atas, dapat di simpulkan bahwa investasi merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh perusahaan dalam suatu aktiva jangka panjang dengan harapan untuk mendapatkan laba di masa yang akan datang.

Dalam praktiknya, dalam usaha untuk mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam suatu tahun tertentu, yang digolongkan sebagai investasi (penentuan modal atau penanaman modal) meliputi pengeluaran-pengeluaran berikut :

1. Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan.
2. Pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan bangunan-bangunan lainnya.
3. Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional.

Jumlah dari ketiga jenis komponen investasi tersebut dinamakan investasi bruto, yaitu yang meliputi investasi untuk menambah kemampuan memproduksi dalam perekonomian dan mengganti barang modal yang telah didepresiasi. Apabila investasi bruto dikurangi oleh nilai depresiasi maka akan di dapat investasi neto.

Secara umum investasi dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA).PMDN dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang produksi, untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian yang berasal dari investasi dalam negeri.Sedangkan PMA adalah pembelanjaan barang-barang modal untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa

yang dilakukan oleh penanaman modal asing dengan menggunakan modal asing (Setyowati dan Fatimah, 2007).

2.2 Peran Investasi dalam Perekonomian

Investasi dalam berbagai bentuknya akan memberikan banyak pengaruh kepada perekonomian suatu negara ataupun dalam cakupan yang lebih kecil yakni daerah. Karna dengan terciptanya investasi akan membawa suatu negara pada kegiatan ekonomi tertentu.

Investasi yang akan berlanjut dengan suatu proses produksi akan menciptakan lapangan kerja, menciptakan barang-barang dan jasa untuk dipasarkan kepada konsumen, dan interaksi kepada produsen, dalam hal investor, dan konsumen dalam menawarkan dan mengkonsumsi barang-barang atau jasa, dan pada gilirannya akan menciptakan kemajuan perekonomian dalam suatu negara.

Pengeluaran investasi merupakan topik utama dalam ekonomi makro karena dua alasan berikut :

1. Fluktuasi investasi sangat besar sesuai dengan perubahan GDP (*Gross Domestic Product*), misalnya karena adanya *business cycle*.
2. Pengeluaran investasi menentukan tingkatpertambahan stok kapital dalam perekonomian, dimana *stock capital* ini sangat menentukan tingkat pertumbuhan suatu negara dalam jangka panjang (Nanga, 2005).

Investasi mengacu pada pengeluaran untuk perluasan usaha dan peralatan baru, dan hal itu menyebabkan persediaan modal berkurang. Depresiasi mengacu

pada persediaan modal, dan hal itu menyebabkan persediaan modal berkurang (Mankiw, 2003).

Pabrik, mesin, peralatan, dan barang-barang baru akan meningkatkan stok modal (*capital stock*) fisik suatu negara (yaitu jumlah riil bersih dari semua barang-barang modal produktif secara fisik) sehingga pada gilirannya akan memungkinkan negara tersebut untuk mencapai tingkat output yang lebih besar.

Pembentukan modal merupakan faktor yang paling penting dan strategis di dalam proses pembangunan ekonomi. Pembentukan modal bahkan disebut sebagai kunci utama menuju pembentukan ekonomi. Proses ini berjalan melalui tiga tingkatan yaitu:

1. Kenaikan tabungan nyata yang tergantung pada kemauan dan kemampuan untuk menabung.
2. Keberadaan lembaga kredit dan keuangan untuk mengalihkan dan menyalurkan tabungan agar dapat menjadi dana yang dapat di investasikan.
3. Penggunaan tabungan untuk tujuan investasi dalam barang-barang modal pada perusahaan.

Pembentukan investasi dapat dilakukan jika masyarakat tidak menggunakan semua pendapatnya untuk dikonsumsi, melainkan ada sebagian yang ditabungkan. Tabungan ini diperlukan untuk pembentukan investasi. Pembentukan modal juga berarti pembentukan keahlian yang kerap kali berkembang sebagai akibat pembentukan modal (Jhingan : 60). Pembentukan keahlian jelas merupakan salah satu dampak dari adanya perkembangan investasi. Investasi yang akan berkembang akan menuntut perkembangan sumber-sumber

daya termasuk keahlian tenaga kerja yang sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Pembentukan atau penciptaan modal akan menjadi sia-sia jika tidak ada faktor-faktor lain yang menunjang pertumbuhan ekonomi. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi investasi, yaitu:

1. Suku Bunga

Suku bunga merupakan faktor yang sangat penting dalam menarik investasi karena sebagian besar investasi biasanya dibiayai dari pinjaman bank. Jika suku bunga pinjaman turun maka akan mendorong investor untuk meminjam modal dan dengan pinjaman modal tersebut maka ia akan melakukan investasi.

2. Pendapatan nasional per kapita untuk tingkat negara (nasional) dan PDRB per kapita untuk tingkat propinsi dan Kabupaten atau Kota

Pendapatan nasional per kapita dan PDRB per kapita merupakan cermin dari daya beli masyarakat atau pasar. Makin tinggi daya beli masyarakat suatu negara atau daerah (yang dicerminkan oleh pendapatan nasional per kapita atau PDRB per kapita) maka akan makin menarik negara atau daerah tersebut untuk berinvestasi.

3. Kondisi sarana dan prasarana

Prasarana dan sarana pendukung tersebut meliputi sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, utilitas, pembuangan limbah dan lain-lain. Sarana dan prasarana transportasi contohnya antara lain :jalan, terminal, pelabuhan, bandar udara dan lainlain. Sarana dan prasarana telekomunikasi contohnya: jaringan telepon kabel maupun nirkabel, jaringan internet, prasarana dan sarana pos. Sedangkan contoh dari utilitas adalah tersedianya air bersih, listrik dan lain-lain.

4. Birokrasi perijinan

Birokrasi perijinan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi investasi karena birokrasi yang panjang memperbesar biaya bagi investor. Birokrasi yang panjang akan memperbesar biaya bagi pengusaha karena akan memperpanjang waktu berurusan dengan aparat. Padahal bagi pengusaha, waktu adalah uang. Kemungkinan yang lain, birokrasi yang panjang membuka peluang oknum aparat pemerintah untuk menarik suap dari para pengusaha dalam rangka memperpendek birokrasi tersebut.

5. Kualitas sumberdaya manusia

Manusia yang berkualitas akhir-akhir ini merupakan daya tarik investasi yang cukup penting. Sebabnya adalah teknologi yang dipakai oleh para pengusaha makin lama makin modern. Teknologi modern tersebut menuntut ketrampilan lebih dari tenaga kerja.

6. Peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan

Peraturan undang-undang ketenagakerjaan ini antara lain menyangkut peraturan tentang pemutusan hubungan kerja (PHK), Upah Minimum, kontrak kerja dan lain-lain.

7. Stabilitas politik dan keamanan

Stabilitas politik dan keamanan penting bagi investor karena akan menjamin kelangsungan investasinya untuk jangka panjang.

8. Faktor-faktor sosial budaya

Contoh faktor sosial budaya ini misalnya selera masyarakat terhadap makanan. Orang Jawa pedalaman misalnya lebih senang masakan yang

manisrasanya, sementara masyarakat Jawa pesisiran lebih senang masakan yang asin rasanya.

9. Pengaruh Nilai tukar

Secara teoritis dampak perubahan tingkat/nilai tukar dengan investasi bersifat *uncertainty* (tidak pasti). Dalam jangka pendek, penurunan tingkat nilai tukar akan mengurangi investasi melalui pengaruh negatifnya pada absorpsi domestik atau yang dikenal dengan *expenditure reducing effect*. Karena penurunan tingkat kurs ini akan menyebabkan nilai riil aset masyarakat yang disebabkan kenaikan tingkat harga-harga secara umum dan selanjutnya akan menurunkan permintaan domestik masyarakat. Gejala diatas pada tingkat perusahaan akan direspon dengan penurunan pada pengeluaran / alokasi modal pada investasi.

Pada sisi penawaran, pengaruh aspek pengalihan pengeluaran (*expenditure switching*) akan perubahan tingkat kurs pada investasi relatif tidak menentu. Penurunan nilai tukar mata uang domestik akan menaikkan produk-produk impor yang diukur dengan mata uang domestik dan dengan demikian akan meningkatkan harga barang-barang yang diperdagangkan/barang-barang ekspor (*traded goods*) relatif terhadap barang-barang yang tidak diperdagangkan (*non traded goods*), sehingga didapatkan kenyataan nilai tukar mata uang domestik akan mendorong ekspansi investasi pada barang-barang perdagangan tersebut.

10. Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi berpengaruh negatif pada tingkat investasi hal ini disebabkan karena tingkat inflasi yang tinggi akan meningkatkan resiko proyek-proyek investasi dan dalam jangka panjang inflasi yang tinggi dapat mengurangi

rata-rata masa jatuh pinjam modal serta menimbulkan distorsi informasi tentang harga-harga relatif. Disamping itu menurut (Greene dan Pillanueva, 1991), tingkat inflasi yang tinggi sering dinyatakan sebagai ukuran ketidakstabilan roda ekonomi makro dan suatu ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan kebijakan ekonomi makro.

2.3 Pengertian Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman Modal Asing (PMA) dapat diartikan sebagai penanaman modal yang dilakukan oleh pihak swasta di negara asal pemilik modal, atau penanaman modal suatu negara ke negara lain atas nama pemerintah negara pemilik modal (Jhinggan, 1994). Penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dengan posisi semacam itu, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan (Dumairy, 1999).

Demikian menurut (Jhinggan, 1990), negara berkembang tidak sanggup mengawali industri dasar dan industri kunci secara sendiri-sendiri. Sekali lagi melalui modal asinglah mereka dapat mendirikan pabrik baja, alat-alat mesin, pabrik elektronika berat dan kimia, dan lain-lain. Lebih dari itu, penggunaan modal asing pada suatu industri akan dapat mendorong perusahaan setempat dengan mengurangi biaya pada industri-industri lain yang dapat mengarah pada perluasan mata rata industri terkait lainnya. Dalam hal ini modal asing akan membantu mengindustrialisasikannya.

Penanaman Modal di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal).

Penanaman Modal Asing (PMA) lebih banyak mempunyai kelebihan diantaranya sifatnya jangka panjang, banyak memberikan andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini, sangat penting bagi negara sedang berkembang mengingat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk penyediaan lapangan kerja.

Faktor yang Mempengaruhi Berkurangnya PMA yaitu:

1. Instabilitas Politik dan Keamanan.
2. Banyaknya kasus demonstrasi/ pemogokkan di bidang ketenagakerjaan.
3. Pemahaman yang keliru terhadap pelaksanaan Undang-Undang Otonomi

2.4 Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagai sumber domestik merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi nasional. Disatu pihak, ia mencerminkan permintaan efektif, dilain pihak ia menciptakan efisiensi produktif bagi produksi di masa depan. Proses penanaman modal ini menghasilkan output nasional dalam berbagai cara. Investasi dibidang barang modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga meningkatkan tenaga kerja. Pembentukan atau penanaman modal ini akan membawa menuju kearah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi pada gilirannya membawa kearah spesialisasi dan penghematan produksi skala luas. Jadi, PMDN menghasilkan kenaikan besarnya output nasional, pendapatan dan pekerjaan, dengan demikian memecahkan masalah inflasi dan neraca pembayaran. Serta membuat perekonomian bebas dari beban utang luar negeri. Sumber yang dapat diarahkan untuk pembentukan modal ialah kenaikan pendapatan nasional, pengurangan konsumsi, penggalakan tabungan, pendirian lembaga keuangan, menggerakkan simpanan emas, meningkatkan keuntungan, langkah-langkah fiskal dan moneter dan sebagainya. Sumber domestik yang paling efektif yaitu tabungan, tabungan pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam pembentukan modal.

Pengertian PMDN yang terkandung dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang Penanaman Modal adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara indonesia, badan usaha indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan

penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 juga menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya. Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah.

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi PMDN yaitu:

1. Potensi dan karakteristik suatu daerah
2. Budaya masyarakat
3. Pemanfaatan era otonomi daerah secara proposional
4. Peta politik daerah dan nasional

5. Kecermatan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan lokal dan peraturan daerah yang menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia bisnis dan investasi.

2.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat pembangunan regional adalah Produk Domestik Regional Bruto, dalam hal ini bertambahnya produksi barang dan jasa dalam Produk Domestik Regional Bruto. Nilai yang tercantum dalam Produk Domestik Regional Bruto tersebut mencerminkan taraf hidup dan tingkat perkembangan ekonomi masyarakat. Dalam perhitungan Produk Domestik Regional Bruto diperlukan suatu pendekatan yang lebih realistis. Akan tetapi selama ini tetap mengacu pada model perhitungan secara nasional, yakni Produk Domestik Bruto (PDB) yang mana dalam perhitungan riilnya didefinisikan oleh (Boediono, 1985) yaitu pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita. Di sini jelas ada sisi yang perlu diperhatikan, yaitu sisi output totalnya dan sisi jumlah penduduknya. Output perkapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduknya. Jadi proses kenaikan output perkapita tidak bisa dan tidak harus dianalisa dengan melihat apa yang terjadi dengan output total disatu pihak dan jumlah penduduk dilain pihak. Suatu teori ekonomi yang lengkap haruslah bisa menjelaskan apa yang terjadi dengan jumlah penduduk.

Dalam konsep ekonomi regional harus dilihat batasan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perekonomian regional berada pada posisi yang lebih terbuka dibanding dengan perekonomian nasional. Seperti halnya Produk Domestik Bruto (PDB), maka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diperoleh dari

produksi seluruh sektor perekonomian regional yang dijabarkan dalam 9 sektor dan terakumulasi dalam 3 sektor menurut jenisnya, yaitu:(i) sektor primer, yang terdiri dari pertanian dan pertambangan, (ii) sektor sekunder, yang terdiri dari industri, bangunan, listrik, gas dan air minum dan (iii) sektor tersier, yang terdiri dari perdagangan, perbankan dan jasa lainnya.

Ada beberapa konsep dan definisi yang dipergunakan secara menyeluruh di semua daerah di Indonesia, seperti yang dikutip dari (Badan Pusat Statistik, 1979) antara lain: (i) Produk Domestik Regional Bruto adalah seluruh produk barang dan jasa yang diproduksi di wilayah domestik regional tanpa memperhatikan apakah faktor-faktor produksi tersebut berasal atau dimiliki oleh penduduk domestik regional tersebut atau tidak. Konsep perhitungan PDRB dalam satu tahun tertentu dapat menggunakan tiga konsep atau cara perhitungan, yaitu dari segi produksi, adalah jumlah nilai produksi barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit produksi dalam suatu daerah/regional dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun, segi pendapatan, adalah jumlah nilai produksi dalam suatu perekonomian regional diperoleh dari penjumlahan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, yaitu pendapatan dari tenaga kerja, modal, harta tetap (tanah dan bangunan) yang disalurkan dan keahlian perusahaan dan segi pengeluaran, adalah jumlah pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga, pemerintah dan lembaga swasta yang mencari keuntungan, pembentukan modal tetap bruto, ekspor netto dan perubahan stok dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun. (ii) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan adalah jumlah nilai produksi,

pendapatan atau pengeluaran berdasarkan harga pada tahun dasar. Cara perhitungan atas dasar harga konstan ini telah menghilangkan pengaruh harga atau inflasi, sehingga dikatakan menunjukkan nilai riil (nyata), (iii) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga pasar merupakan penjumlahan nilai tambah bruto dari seluruh lapangan usaha sektor yang meliputi balas jasa faktor produksi (upah, gaji dan surplus usaha), penyusutan dan pajak tak langsung netto, (iv) Produk Regional Bruto adalah PDRB ditambah dengan pendapatan netto dari luar daerah, (v) Produk Regional Netto adalah PDRB dikurangi penyusutan barang-barang modal, (vi) Produk Regional Netto atas dasar biaya faktor produksi adalah Produk Regional Netto atas dasar harga pasar dikurangi pajak tak langsung netto. Produk Regional Netto atas dasar biaya faktor produksi merupakan pendapatan regional, (vii) Pendapatan Perkapita adalah Produk Regional Netto atas dasar biaya faktor produksi dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun, (viii) Pajak Tak Langsung Netto adalah pajak tak langsung dikurangi dengan subsidi yang diberikan pemerintah kepada produsen.

Dari berbagai definisi dan konsep di atas dapat dikatakan bahwa peningkatan PDRB adalah merupakan salah satu cerminan pokok keberhasilan usaha pembangunan regional. Suatu perekonomian regional dikatakan mengalami pertumbuhan dan berkembang apabila tingkat ekonomi lebih tinggi dari yang dicapai pada masa sebelumnya, dimana nilai PDRB dari tahun ke tahun bebas dari pengaruh harga. Hal ini dapat dilakukan dengan menghitung PDRB berdasarkan harga konstan. Oleh karena itu, pengertian PDRB dibedakan atas dua bagian, yakni PDRB atas harga berlaku dan PDRB atas harga konstan. PDRB atas

harga berlaku dihitung berdasarkan harga-harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan, yang berarti termasuk kenaikan harga-harga ikut dihitung. Sedangkan PDRB atas harga konstan dihitung berdasarkan harga pada tahun dasar.

Laju pertumbuhan ekonomi regional dari tahun ke tahun yang didasarkan pada PDRB atas harga berlaku disebut pertumbuhan PDRB nominal, sedangkan PDRB atas harga konstan disebut sebagai pertumbuhan PDRB nyata/riil. Perekonomian regional yang tidak mengalami peningkatan PDRB riil, dapat dikatakan bahwa perekonomian regionalnya berada pada keadaan resesi, yaitu apabila penurunan tidak seberapa, akan tetapi apabila PDRB riilnya cukup besar, maka gejala ekonomi regional tersebut biasa disebut depresi. Penurunan PDRB riil tidak terjadi apabila tingkat pertumbuhan PDRB nominal lebih rendah daripada tingkat kenaikan harga. Oleh karena itu untuk mewujudkan kenaikan PDRB riil diperlukan peningkatan PDRB nominal yang lebih tinggi daripada inflasi.

Selanjutnya, untuk menentukan PDRB nyata perkapita yang merupakan pendapatan rata-rata penduduk tingkat regional pada suatu tahun tertentu, maka yang harus dilakukan adalah membagi PDRB riil pada tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama.

2.6 Metode Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto

2.6.1 PDRB menurut Penggunaan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut penggunaan ini sering juga disebut sebagai PDRB menurut permintaan/pengeluaran. PDRB menurut penggunaan merupakan jumlah seluruh nilai akhir barang jadi dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah selama setahun. Yang dimaksud dengan barang jadi adalah barang yang tidak digunakan untuk diproses kembali oleh suatu industri, akan tetapi untuk dikonsumsi oleh penduduk. Sedangkan barang setengah jadi termasuk dalam penghitungan PDRB, karena digunakan untuk diproses kembali menjadi barang jadi, sehingga nilai dari barang tersebut sudah termasuk di dalam barang jadi yang dihasilkan

Jika dipandang sebagai sisi pengeluaran maka PDRB merupakan jumlah seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh institusi pada suatu wilayah selama setahun. Institusi tersebut yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Secara umum PDRB penggunaan terdiri dari empat jenis pengeluaran, yaitu: pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran untuk investasi, pengeluaran untuk pemerintah, dan ekspor netto. Komponen PDRB lengkap menurut penggunaan adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran lembaga swasta yang tidak mencari untung (nirlaba), pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan tetap modal bruto, perubahan stok, dan ekspor netto (ekspor dikurangi impor)

2.6.2 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Yang di maksud dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga meliputi semua pengeluaran untuk konsumsi barang dan jasa, setelah dikurangi hasil netto dari barang bekas/tidak terpakai yang dilakukan oleh rumah tangga yang berdomisili di suatu wilayah domestik pada periode satu tahun.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan. Pengeluaran untuk konsumsi makanan, seperti bahan makanan, minuman, rokok, tembakau, dan sebagainya. Sedangkan pengeluaran untuk konsumsi bukan makanan seperti barang tahan lama, pakaian, bahan bakar, jasa-jasa, pemeliharaan kesehatan, pendidikan, rekreasi, pengangkutan, dan sebagainya. Pengeluaran konsumsi rumah tangga tersebut untuk dikonsumsi bukan untuk digunakan keperluan usaha, dan seandainya terdapat pembelian/pengeluaran rumah tangga yang diperuntukkan untuk keperluan usaha maka harus dikurangi. Pembelian rumah dan perbaikan besar untuk rumah tidak termasuk pengeluaran konsumsi, melainkan sebagai pembentukan modal, tetapi pengeluaran atas rumah yang di tempati seperti sewa rumah, perbaikan ringan, pembayaran rekening air, listrik, telepon dan lain-lain dimasukkan sebagai pengeluaran rumah tangga.

2.6.3 Pengeluaran Konsumsi LNPRT

Pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) adalah berbagai pengeluaran oleh lembaga untuk pengadaan barang dan jasa, yang secara prinsip mempunyai fungsi dalam melayani rumah

tangga. Pengeluaran konsumsi LNPRT digolongkan sebagai bagian dari pengeluaran konsumsi akhir yang ditujukan untuk menjaga kelangsungan lembaga.

Lembaga non profit yang melayani rumah tangga merupakan satu entitas legal, yang secara prinsip terlibat dalam kegiatan layanan atau pemberian jasa pada rumah tangga (non market). Seluruh biaya kegiatan lembaga bersumber dari sumbangan atau donasi rumah tangga. Oleh karenanya hampir seluruh aktifitas lembaga dirancang dan dikontrol oleh rumah tangga. Dengan demikian LNPRT adalah lembaga non profit yang mengasihkan jasa sosial kemasyarakatan non komersial dengan dana dari masyarakat atau anggota. Produknya dijual pada tingkat dibawah harga pasar atau bahkan diberikana secara cuma-cuma kepada masyarakat atau anggota lembaga. Lembaga non profit yang melayani rumah tangga LNPRT, dibagi menjadi tujuh bentuk organisasi yaitu: Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS), Organisasi Sosial (ORSOS), Organisasi Profesi (ORPROF), perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), Lembaga Keagamaan, Organisasi Bantuan Kemanusiaan/Beasiswa.

2.6.4 Pengeluaran Pemerintah

Yang dimaksud dengan pemerintah adalah kegiatan pemerintahan dalam penyediaan jasa pelayanan umum kepada masyarakat. seperti kegiatan administrasi pemerintahan, menjaga kestabilan keamanan negara, meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat, mengatur ekonomi dan lain-lain.

Pemerintah sebagai konsumen akhir mencakup departemen, lembaga non departemen, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah

desa. Pengeluaran pemerintah mencakup seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan administrasi dan pertahanan. Pengeluaran ini berupa belanja pegawai, penyusutan barang modal, belanja barang dan jasa belanja barang disini termasuk biaya perjalanan dinas, pemeliharaan dan pengeluaran lain yang bersifat rutin; artinya biaya-biaya yang dikeluarkan habis digunakan dalam proses produksi/pelayan masyarakat.

Pengeluaran untuk belanja pegawai yaitu pengeluaran pemerintah untuk pembayararn upah gaji dalam bentuk uang dan barang beserta tunjangannya, iuran jaminan social, dana pensiun, asuransi kecelakaan, tabungan hari tua dan lain sebagainya.

2.6.5 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Yang dimaksud dengan pembentukan modal tetap bruto suatu daerah/wilayah adalah pengadaan, pembuatan dan pembelian barang modal baru dari dalam daerah/wilayah dan termasuk juga barang modal baru atau bekas dan luar daerah/wilayah yang digunakan sebagai alat untuk produksi.

Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) adalah pembelian barang-barang modal baru dari dalam negeri dan pembelian barang-barang modal bekas dari luar negeri yang terjadi pada suatu tahun tertentu, dikurangi penjualan barang modal bekas, termasuk juga pengadaan atau pembuatan barang modal serta perbaikan-perbaikan besar yang menyebabkan bertambahnya umur pemakaian atau bertambahnya kapasitas produksi. Pembentukan modal disini termasuk margin

perdagangan dan biaya pengangkutan, biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pemindahan hak milik dalam transaksi jual beli barang-barang modal.

2.6.6 Perubahan Stok

Yang dimaksud dengan stok adalah persediaan barang pada akhir tahun diperoleh dari pembelian yang akan digunakan sebagai input pada suatu kegiatan ekonomi ataupun untuk dijual kembali. Perubahan stok adalah jumlah persediaan barang pada akhir tahun dikurangi dengan jumlah persediaan barang pada awal tahun. Data tentang stok dari berbagai jenis barang masih sangat sulit diperoleh, sehingga komponen perubahan stok dalam PDRB penggunaan masih merupakan perkiraan kasar, karena dihitung dan hasil penjumlahan nilai tambah bruto PDRB sektoral dikurangi dengan komponen PDRB penggunaan lainnya. Sehingga nilai perubahan stok tersebut masih terkandung selisih statistik.

2.6.7 Ekspor/Impor

Ekspor dan impor merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa antar penduduk provinsi atau dengan penduduk negara lain. Yang dimaksud dengan ekspor dan impor disini batasan wilayahnya adalah domestik provinsi dan luar negeri. Wilayah provinsi artinya transaksi barang dan jasa yang terjadi antar wilayah provinsi di Indonesia, sedangkan luar negeri transaksi yang terjadi antar negara.

Ekspor barang ditandai menurut harga *free on Board*(FOB) sedangkan impor menurut *Cost Insurance Freight*(CIF). Yang dimaksud dengan FOB adalah penyerahan barang antara eksportir dengan importer, dengan penetapan harga dihitung berdasarkan nilai barang ditambah dengan semua biaya sampai barang berada di

ataskapal. Biaya yang terjadi tanggungan pihak penjual ke dermaga pelabuhan, biaya muat dari dermaga ke atas kapal serta biaya memadatkan atau menyusun komoditi. Sedangkan yang dimaksud dengan CIF adalah penyerahan barang antara eksportir dengan importir, dimana harga jual sudah mencakup harga pokok barang yang bersangkutan serta ongkos transportasi. Artinya eksportir mengatur dan menanggung semua biaya yang dikeluarkan dalam pengiriman barang dari tempat pelaku ekspor ke tempat pelaku impor.

Penghitungan ekspor maupun nilainya diperoleh dalam satuan kurs dolar US, sehingga perlu dikonversi ke dalam satuan rupiah. Untuk konversi nilai ekspor digunakan rata-rata kurs beli \$ US bulanan, sedangkan impor digunakan rata-rata kurs jual \$ US bulanan.

2.7 Metode Penghitungan

2.7.1 PDRB menurut Penggunaan

Seperti telah dijelaskan terlebih dahulu, bahwa PDRB menurut penggunaan merupakan jumlah seluruh nilai akhir barang jadi dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah selama satu tahun. Dengan demikian dapat diformulasikan dalam model persamaan sebagai berikut:

$$Y = C + I + E - M$$

$$C = C_r + C_n + C_p$$

$$I = I_f + I_s$$

Dimana,

$$Y = \text{Produk Domestik Regional Bruto}$$

C	= Konsumsi
Cr	= Konsumsi Rumahtangga
Cn	= Konsumsi Nirlaba
Cp	= Konsumsi Pemerintah
I	= Pembentukan Modal
If	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Is	= Perubahan Stok
E	= Ekspor
M	= Impor

2.7.2 Konsumsi Rumah Tangga

Seperti telah diungkapkan sebelumnya, konsumsi rumah tangga terdiri dari dua komponen yaitu untuk pengeluaran makanan dan bukan makanan. Sumber data yang digunakan adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Metode penghitungan untuk konsumsi makanan adalah gabungan dari metode langsung dan penilaian harga eceran/harga yang dibayar oleh rumah tangga. Metode tersebut digunakan untuk memperkirakan konsumsi rumahtangga perkapita per jenis barang selama satu tahun. Data konsumsi yang dipakai adalah rata-rata konsumsi perkapita dalam kuantum selama seminggu. Untuk memperoleh selama satu tahun rata-rata konsumsi tersebut dikali dengan 52. Sedangkan untuk memperoleh perkiraan konsumsi pada tahun-tahun yang tidak dilaksanakan survei (Susenas) dengan modul pengeluaran maka dilakukan perkiraan dengan cara menghitung elastisitas per jenis barang.

Model regresi yang digunakan untuk memperkirakan koefisien elastisitas konsumsi perkapita tersebut adalah:

$$Q_i = a Y_i^b$$

Dimana:

Q_i = Rata-rata pengeluaran per-kapita (kuantitas)

Y_i = GDP per-kapita

a = Konstanta

b = Koefisien Elastisitas konsumsi terhadap GDP

Setelah itu dihitung perkiraan konsumsi perkapita dengan rumus sebagai berikut

$$C_{(n+1)} = C_n + (b \times dp_{(n+1)}) \times C$$

Dimana:

$C_{(n+1)}$ = Rata-rata konsumsi (kuantum) perkapita sebulan tahun (n+1)

C_n = Rata-rata konsumsi (kuantum) perkapita sebulan tahun dasar (n)

b = Koefisien Elastisitas

$dp_{(n+1)}$ = Perubahan pendapatan perkapita harga konstan tahun ke n dan-1

Metode penghitungan untuk memperkirakan konsumsi bukan makanan, caranya hampir sama dengan perkiraan konsumsi makanan. Perbedaannya terdapat pada model regresinya, dimana pada konsumsi bukan makanan digunakan model regresi linier sederhana;

$$Q_i = a + b Y_i$$

Dimana:

Q_i = Rata-rata Konsumsi per bulan (Rp)

- Y_i = Rata-rata Pendapatan perkapita Sebulan
 a = Konstanta
 b = Koefisien Elastisitas
 I = Komoditas ke- i

2.7.3 Pengeluaran LNPRT (Lembaga Non Profit yang melayanl Rumah Tangga)

Produksi Lembaga Non Profit yang melayanl Rumah Tangga adalah biaya antara ditambah dengan nilai tambah bruto, sedangkan pengeluarannya adalah output dikurangi dengan penerimaan hasil penjualan barang produksi dan penerimaan atas pelayanan jasa. Penghitungan pengeluaran LNPRT ini, dengan menjumlahkan semua output atau pengeluaran. Sumber data diperoleh dan survei khusus, data tersebut dalam bentuk nilai pengeluaran atas barang dan jasa oleh lembaga serta barang dan jasa dan transfer pihak lain yang digunakan dalam rangka menghasilkan layanan, atau dengan menggunakan metode estimasi:

$$KLNPR T_i = TLNPR T_i \times ALNPR T_i$$

$KLNPR T_i$ = Konsumsi LNPRT jenis i

$TLNPR T_i$ = Jumlah populasi LNPRT jenis i

$ALNPR T_i$ = Rata-rata konsumsi LNPRT jenis i per unit

$$KLNPR T = \Sigma KLNPR T_i$$

2.7.4 Konsumsi Pemerintah

Sumber data yang digunakan dalam penghitungan besarnya konsumsi pemerintah adalah pengeluaran pemerintah pusat dan pertahanan, realisasi pengeluaran daerah tingkat I, tingkat II, dan pemerintah desa serta jumlah pegawai negeri pusat dan daerah.

Metode penghitungan dalam memperkiraan besarnya pengeluaran konsumsi pemerintah sama dengan total output dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan pemerintahan.

Untuk pemerintah daerah, belanja barang dan belanja pegawai diperoleh dari sisi pengeluaran APBD (tingkat I, II) dan desa. Perkiraan penyusutan diperoleh dari persentase tertentu terhadap belanja pegawai. Nilai penjualan barang dan jasa (output pasar) diperoleh dari sisi penerimaan APBD yang merupakan penerimaan dan bagian pendapatan asli daerah (PAD) rincian penerimaan lain-lain. Nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan adalah penjualan barang dan jasa pada setiap tingkat I, tingkat II dan desa (untuk pemerintah desa data tidak tersedia)

Belanja barang, belanja pegawai serta nilai penjualan barang dan jasa pemerintah daerah tingkat II (kabupaten/kota) mencakup belanja barang, belanja pegawai serta nilai penjualan barang dan jasa pemerintah desa, pemerintah daerah tingkat II (kabupaten/kota), ditambah nilai penjualan barang dan jasa pemerintah daerah tingkat I (propinsi) dan pemerintah pusat yang merupakan bagian dan belanja barang, belanja pegawai serta nilai penjualan barang dan jasa pemerintah daerah tingkat II (kabupaten/kota).

2.7.5 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan modal tetap bruto dapat dibedakan atas:

- Pembentukan modal dalam bentuk bangunan/konstruksi
- Pembentukan modal dalam bentuk mesin dan peralatan

Metode yang digunakan dalam penghitungan pembentukan modal tetap bruto adalah pendekatan yang berdasarkan pada arus barang (*commodity flow*), yaitu suatu pendekatan melalui penggunaan komoditi barang di seluruh sektor ekonomi. Untuk mengestimasi pembentukan modal dalam bentuk bangunan/konstruksi diperoleh dengan menggunakan rasio sebesar 0,9215 dari output konstruksi yang merupakan pembentukan. Sedangkan pembentukan modal dalam bentuk mesin dan peralatan diperoleh dengan cara ekstrapolasi.

2.7.6 Perubahan Stok

Nilai perubahan stok dalam komponen PDRB masih merupakan selisih statistic. Perhitungan dari PDRB hasil penjumlahan nilai tambah bruto sektoral dikurangi dengan komponen permintaan akhir lainnya.

2.7.7 Ekspor/Impor

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan ekspor dan impor bersumber dari Publikasi Statistik Ekspor dan Impor yang diterbitkan oleh BPS untuk perdagangan luar negeri. Nilai tukar terhadap \$ US baik nilai jual maupun beli diperoleh dari Laporan Perbankan Bank Indonesia.

Metode estimasi untuk komponen ekspor dan impor dilakukan dengan menghitung nilai ekspor dan impor barang dan jasa (masih dalam \$ US), setelah nilai

ekspor dan impor diperoleh dikonversi dengan nilai rupiah. Untuk ekspor menggunakan nilai rata-rata kurs beli, sedangkan impor menggunakan kurs jual.

2.8 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan efek dari pembangunan ekonomi suatu negara. Dan untuk melakukan pembangunan ekonomi ada 4 elemen yang perlu diperhatikan (Boediono, 1981) yaitu: 1. Sumber daya manusia (penawaran tenaga kerja, pendidikan, disiplin dan motivasi). 2. Sumber daya alam (tanah, barang, tambang, minyak, dan lain-lain). 3. Formasi Modal (mesin, infrastruktur, dan lain-lain). 4. Teknologi (pengetahuan, tenaga ahli, dan pengelolaan).

Menurut (Case dan Fair, 2004) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan keluaran total suatu perekonomian. Sedangkan menurut (Nanga, 2001) memberikan pengertian pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan dalam kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa.

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses bukan gambaran ekonomi pada suatu saat. Aspek dinamis dari suatu perekonomian yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Ada atau tidak adanya pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara dapat digunakan tiga pendekatan (Syafri, 1999), yaitu sebagai berikut: 1. Tingkat penghidupan masyarakat yaitu, apakah terdapat peningkatan konsumsi potensial saat sekarang dibandingkan dengan tingkat konsumsi di masa lampau. 2. Sumber-sumber produksi, apakah dalam negara-negara tersebut ditemukan sumber-sumber produksi baru, serta sumber-sumber yang ada dapat dipertahankan dan

dimanfaatkan lebih efisien. 3. Tingkat pendapatan nasional, apakah pendapatan nasional sekarang lebih meningkat dibandingkan dengan pendapatan nasional sebelumnya. Tetapi apabila pendapatan nasional yang meningkat jika tidak diiringi dengan pendistribusian yang baik dan merata maka akan tidak berarti.

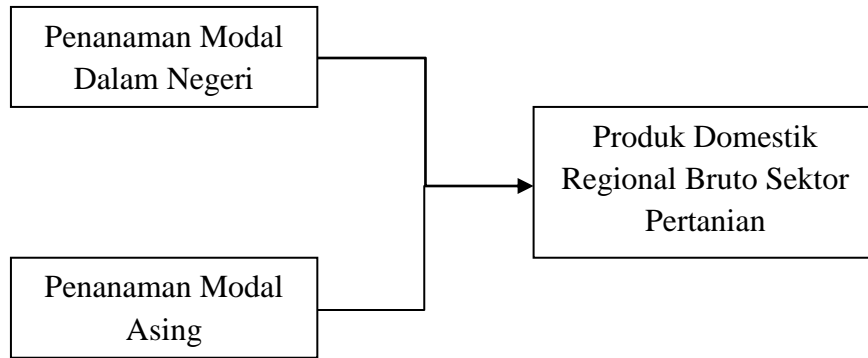
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara (Sukirno,1994) diantaranya adalah:

1. Tanah dan kekayaan alam lainnya, kekayaan alam akan mempermudah usaha untuk membangun perekonomian suatu negara terutama pada masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi karena faktor-faktor lainnya seperti modal, tenaga ahli dan kurangnya pengetahuan para pengusaha masih sulit untuk dikembangkan.
2. Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja, penduduk yang bertambah dari masa ke masa dapat menjadi pendorong maupun penghambat perkembangan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan pertambahan tersebut memungkinkan negara itu menambah produksi begitupun dengan keahlian tenaga kerjanya jika meningkat maka akan meningkatkan produktivitas sehingga menambah produksi yang pada akhirnya mendukung perkembangan ekonomi. Tetapi apabila dalam perekonomian suatu negara terjadi keadaan dimana pertambahan tenaga kerja tidak dapat menaikkan produksi yang tingkatnya adalah lebih cepat dari tingkat pertumbuhan penduduk maka pendapatan perkapita akan menurun. Dengan demikian penduduk yang berlebih-lebihan akan menimbulkan kemerosotan kemakmuran rakyat.

3. Barang-barang modal dan tingkat teknologi, barang modal dan teknologi sangat dibutuhkan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi dapat mempertinggi efisiensi produksi suatu barang, menurunkan biaya produksi dan meningkatkan jumlah produksi.
4. Sistem sosial dan sikap masyarakat, para ahli ekonomi telah menunjukkan bahwa sistem sosial dan sikap masyarakat dapat menjadi penghambat pembangunan. Adat-istiadat yang tradisional dapat menghambat masyarakat untuk menggunakan cara produksi yang modern dan yang produktivitasnya tinggi sehingga pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipercepat.
5. Luas pasar sebagai sumber pertumbuhan, Adam Smith telah menunjukkan bahwa spesialisasi dibatasi oleh luasnya pasar dan spesialisasi yang terbatas membatasi pertumbuhan ekonomi. Apabila luas pasar terbatas tidak dapat mendorong para pengusaha untuk menggunakan teknologi modern yang tidak dapat mendorong para pengusaha untuk menggunakan teknologi modern yang tingkat produktivitasnya sangat tinggi.

2.9 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berbentuk asosiatif karena menggunakan lebih dari satu variable bebas yaitu: PMDN dan PMA sektor pertanian di Provinsi Bali yang digunakan sebagai perbandingan untuk mengukur pangaruh suatu variabel terikat yaitu PDRB sektor pertanian.



Gambar 2.7
Kerangka Pemikiran Penelitian Peran PMDN dan PMA Terhadap PDRB sektor
Pertanian di Provinsi Bali